

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, dan tentunya dapat dan harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwirausaha, salah satunya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, terdapat 64.194.057 unit usaha pada tahun 2018, dimana jumlah ini meningkat sebesar 1.271.440 atau meningkat 2,02% dari tahun 2017. Hal ini menandakan bahwa sekitar 25% dari total penduduk Indonesia (270.020.000 jiwa) berwirausaha melalui UMKM.

Usaha yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Indonesia tentunya mengalami banyak persaingan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dimana Indonesia telah masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015, sehingga dibutuhkan adanya kreativitas maupun inovasi yang perlu dan harus dilakukan oleh pemilik UMKM agar dapat terus berkembang atau paling tidak dapat bertahan pada persaingan yang dihadapi.

Untuk dapat mengembangkan usahanya, tentunya diperlukan modal atau pendanaan yang besar. Tetapi, sebagian besar UMKM hanya menggunakan modal pribadi untuk menjalankan usahanya. Padahal, pengembangan usaha membutuhkan modal yang besar, sehingga dibutuhkan pendanaan dari pihak ketiga seperti bank melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) agar pengembangan usaha dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Namun, fenomena yang ada di masyarakat, pelaku usaha tidak menggunakan modal atau pendanaan dari bank untuk kegiatan usahanya, dengan alasan usaha masih kecil dan belum berjalan lama (baru berjalan 1 - 3 tahun). Selain itu, pelaku usaha merasa rumitnya persyaratan yang diberikan oleh bank. Salah satu syarat yang diberikan agar mendapatkan kredit dari bank adalah laporan keuangan UMKM yang secara langsung dapat mencerminkan keadaan perusahaan. Akan

tetapi, banyak pelaku usaha yang tidak membukukan usahanya, atau membuat laporan keuangan perusahaannya. Penyebabnya dikarenakan pelaku usaha terlalu fokus terhadap proses produksi, operasional, dan kegiatan usaha lainnya, sehingga tidak memperhatikan pencatatan dan pembukuan dengan baik (Suastini *et al*, 2018).

Agar mendapatkan kredit dari bank, salah satu syarat adalah UMKM harus membuat laporan keuangan. Akan tetapi, sebagian besar pelaku usaha hanya mencatat kas masuk (pendapatan) dan kas keluar (beban biaya) saja. Namun juga perlu diperhatikan, dalam pembuatan laporan keuangan tentu saja harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), hal ini dikarenakan SAK EMKM mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM, dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga Pelaku UMKM hanya perlu mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. SAK EMKM juga dilengkapi dengan contoh penerapan SAK EMKM, sehingga dapat memudahkan UMKM dalam menerapkan SAK tersebut.

Selain digunakan untuk mendapatkan kredit dari bank, laporan keuangan usaha juga dapat menjadi tolok ukur bahwa usaha yang dijalankan terus berkembang dari tahun ke tahun, atau tambah merugi. Pembukuan laporan keuangan juga akan bermanfaat bagi UMKM yang memiliki beberapa cabang yang kepemilikannya dimiliki oleh diri sendiri, sehingga kegiatan usaha dari setiap cabang terdokumentasi dengan jelas. Oleh sebab itu, penerapan SAK EMKM ini dirasa akan sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, baik yang membutuhkan kredit dari bank maupun tidak.

Madiun mempunyai julukan Kota Gadis, yakni Kota Perdagangan dan Perindustrian. Terdapat banyak sekali UMKM di berbagai bidang, makanan dan minuman, kerajinan, maupun pakaian. Sebagian besar pelaku UMKM di Kota Madiun menggunakan kredit dari pihak ketiga untuk dapat mengembangkan usahanya maupun memenuhi kebutuhan saat itu, dan juga kehidupan sehari-hari. Pelaku usaha yang menggunakan kredit dari bank ada yang membukukan transaksi dari usahanya meskipun tidak sesuai dengan SAK EMKM (hanya laporan laba

rugi), dan beberapa dari pelaku UMKM tidak membukukan laporannya, namun hanya mencatat untuk diketahui berapa pengeluaran dan pendapatan harian yang dihasilkan dari usahanya. Namun banyak juga pelaku UMKM yang tidak begitu peduli mengenai pendapatan maupun pengeluaran, karena pendapatan yang didapatkan saat itu digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa tidak terdapat pemisahan antara uang pribadi dan uang usaha.

Pembukuan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM sebenarnya adalah untuk mempercepat proses persetujuan kredit dari bank, sehingga kredit akan lebih cepat didapatkan. Dalam seminar yang dilaksanakan oleh program studi Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia pada tanggal 19 Maret 2021, yang diisi oleh Pimpinan Cabang Bank Syariah Indonesia kantor cabang Gresik jl. Dr. Soetomo, menyatakan bahwa pelaku UMKM yang mengajukan kredit ke bank tidak wajib melampirkan laporan keuangan sebagai salah satu syaratnya, namun tetap melampirkan bukti pengeluaran maupun pemasukan dari kegiatan usahanya. Hal ini ditengarai oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pencatatan dan pembukuan laporan keuangan. Sehingga bank mempermudah akses kredit untuk pelaku UMKM.

Dalam penelitian Handayani (2018), menyatakan bahwa tingkat kebutuhan SAK EMKM bagi UMKM masih sangat rendah, dan SAK EMKM masih dianggap memberatkan bagi UMKM itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha kurang memiliki pengetahuan akuntansi, dan masih beranggapan bahwa belum terlalu membutuhkan pencatatan dan pembukuan bagi keberlangsungan usahanya. Terutama pelaku usaha super mikro, yang terkesan menjalankan usahanya dengan apa adanya dan tidak memikirkan untuk mengembangkan usahanya, sehingga mengesampingkan dalam hal pelaporan keuangan usahanya. Hal tersebut yang membuat usaha yang ditekuni tidak bisa berkembang dengan baik.

Selain sumber modal yang digunakan untuk berwirausaha, ukuran usaha juga berpengaruh dalam penerapan SAK EMKM. Dalam UU no 20 tahun 2008 BAB IV Pasal 6 dijelaskan bahwa ukuran usaha terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Sehingga, hanya usaha yang

termasuk dalam kategori tersebut yang dapat menerapkan SAK EMKM. Penelitian mengenai sumber modal pernah dilakukan oleh Suryati (2021) yang menyatakan bahwa sumber modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM bidang jasa atau pelayanan laundry di Kecamatan Makasar.

Penelitian yang pernah dilakukan Anggraini (2018) dalam penelitian Suastini *et al* (2018) menyatakan bahwa ukuran usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, hal serupa juga terdapat dalam penelitian Nugroho (2016), yang menyatakan bahwa ukuran usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman UMKM atas SAK ETAP. Sehingga, semakin besar usaha yang dijalani oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan pencatatan dan pembukuan agar kegiatan usahanya dapat dikendalikan oleh pelaku usaha dengan mudah. Tentunya pencatatan dilakukan sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yaitu SAK EMKM.

Dalam penelitian Suastini *et al* (2018), Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat diukur dari tingkat pendidikan dan kemampuannya. Menurut Arfianti dan Widodo dalam Suastini *et al* (2018), kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup mumpuni.

Penelitian sebelumnya mengenai SDM yang dilakukan oleh Tuti (2014) dan Lohanda (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan jenjang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ismadewi (2017) yang menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Hal tersebut membuat pelaku usaha yang memiliki SDM yang berkualitas dan sadar akan pentingnya pencatatan, akan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), meskipun ukuran usaha yang dijalankan masih termasuk dalam kategori mikro, bahkan super mikro sekalipun.

Selain itu, kemampuan sumber daya manusia dalam pemahaman akuntansi juga diperlukan dalam penerapan SAK EMKM. Menurut Roviyantie dalam penelitian Pardita *et al* (2019) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi, oleh karena itu dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wilfa dalam penelitian Pardita *et al* (2019) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi pelaku usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Diani dalam penelitian Pardita *et al* (2019) menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan semakin tinggi pemahaman akuntansi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Baik atau tidaknya laporan keuangan yang dihasilkan diukur menggunakan Standar Akuntansi yang berlaku, yaitu SAK EMKM. Hal tersebut membuat pelaku usaha berpikir bahwa begitu pentingnya pemahaman akuntansi bagi sumber daya manusia, agar penerapan SAK EMKM dapat sesuai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryati (2021), yang berjudul Pengaruh Ukuran Usaha dan Sumber Modal terhadap Penerapan Standar Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Jasa atau Pelayanan Laundry di Kecamatan Makasar tahun 2019 yaitu terletak pada variabel bebas yang digunakan dan objek yang digunakan. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tambahan variabel yaitu kualitas sumber daya manusia dan tingkat pemahaman akuntansi. Dan objek yang digunakan adalah UMKM di bidang makanan dan minuman, yang berada di Kota Madiun.

Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa sebagai makhluk yang mampu berfikir secara rasional, seseorang akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk memikirkan secara sistematis implikasi tindakan dan keputusan strategis yang akan diambil. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam pemenuhan salah satu syarat mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan, yaitu laporan keuangan perusahaannya, seharusnya membuat para pelaku UMKM sadar dan berpikir untuk menggunakan informasi yang didapatkan

untuk mengambil keputusan strategis kedepannya. Dalam hal ini informasi yang didapatkan oleh pelaku UMKM adalah SAK EMKM, yang seharusnya pelaku UMKM dapat berfikir secara rasional sehingga dapat menggunakan informasi yang didapatkan untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Theory of Planned Behavior menjelaskan pengaruh motivasional untuk melakukan suatu perilaku dan menentukan suatu keputusan strategis dipengaruhi oleh dua faktor, yakni *control beliefs* dan *perceived power*. Penerapan SAK EMKM dalam keberlangsungan UMKM seseorang akan menjadikan sebuah dorongan untuk mematuhi peraturan yang telah diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan. Tentunya hal ini memerlukan adanya dorongan kepercayaan dan kemauan oleh pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM yang telah diterbitkan oleh DSAK yang diharapkan dapat dengan mudah dipelajari dan diterapkan oleh pelaku UMKM, agar dapat menyusun laporan keuangannya dan dapat berguna di kemudian hari bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sumber modal, ukuran usaha, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap penerapan standar akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah di Kota Madiun.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sumber modal berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pada UMKM di Kota Madiun?
2. Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pada UMKM di Kota Madiun?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pada UMKM di Kota Madiun?
4. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pada UMKM di Kota Madiun?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh sumber modal terhadap penerapan standar akuntansi pada UMKM di Kota Madiun.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran usaha terhadap penerapan standar akuntansi pada UMKM di Kota Madiun.
3. Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pada UMKM di Kota Madiun.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap penerapan standar akuntansi pada UMKM di Kota Madiun.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti dapat menjadikan acuan atau rujukan dalam penelitian selanjutnya agar lebih bermanfaat bagi pengguna.
2. Bagi Universitas, semoga penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dalam pentingnya literasi peraturan yang berlaku bagi mahasiswa khususnya yang akan terjun sebagai pelaku UMKM.
3. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai pembuatan kebijakan selanjutnya agar sesuai bagi pelaku UMKM.
4. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan standar akuntansi oleh UMKM.